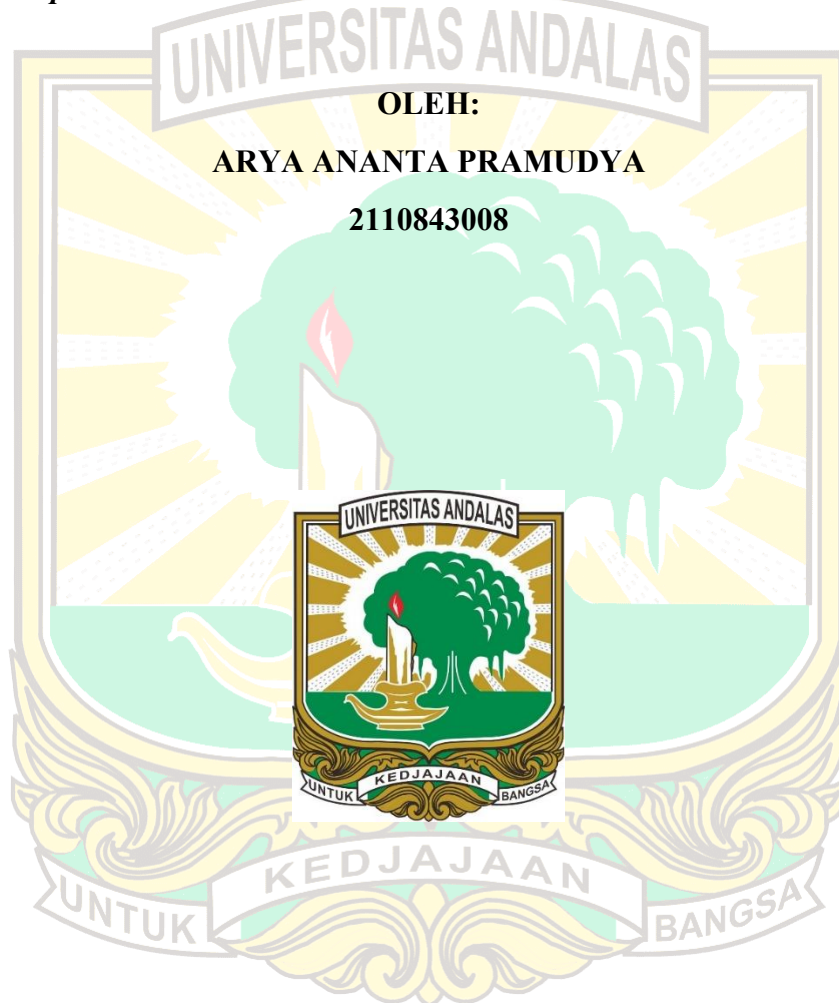


**AKUNTABILITAS SOSIAL: EKSISTENSI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEPENUHAN HULU
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Arya Ananta Pramudya, 2110843008, Akuntabilitas Sosial: Eksistensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2023, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2025. Dibimbing oleh: Dr. Hendri Koeswara, M.Soc.Sc dan Dr. Desna Aromatica, M.AP. Skripsi ini terdiri dari 119 Halaman dengan referensi 6 buku teori, 4 buku metode, 18 jurnal, 1 Perundang-undangan, 2 Peraturan Menteri, dan 1 Peraturan Bupati.

Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan fenomena yang menarik dalam pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah yang diselenggarakan sebagai wadah penyampaian informasi pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat selaku pemegang kepentingan utama. Fenomena ini tentu menjadi indikasi adanya praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kepenuhan Hulu. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kepenuhan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk memaknai eksistensi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa melalui konsep akuntabilitas sosial.

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas sosial oleh Grandvoinnet dkk., yakni: *Citizen Action, State Action, Civic Mobilization, Information, dan Citizen-State Interface*. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah mencerminkan mekanisme akuntabilitas sosial yang efektif melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya sekadar mekanisme formal tetapi terwujud dalam keterlibatan aktif masyarakat melalui forum musyawarah desa dan interaksi sosial alami, yang diperkuat oleh komitmen pemerintah terhadap transparansi informasi meskipun belum didukung dengan digitalisasi desa. Fleksibilitas pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat terkait musyawarah menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas masyarakat sebagai pemilik kepentingan utama. Interaksi ini telah mentransformasi mekanisme musyawarah dari sekadar formalitas menjadi sarana efektif pengawasan, yang pada akhirnya menegaskan posisi masyarakat bukan sebagai partisipan simbolik melainkan pemegang kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menciptakan sistem tata kelola keuangan desa yang transparan dan partisipatif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntabilitas Sosial, Eksistensi Masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Arya Ananta Pramudya, 2110843008, Social Accountability: Community Existence in the Financial Management of Kepenuhan Hulu Village, Rokan Hulu Regency, Riau Province, 2023, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2025. Mentored by: Dr. Hendri Koeswara, M.Soc.Sc and Dr. Desna Aromatica, M.AP. This thesis consists of 119 pages with references to 6 theoretical books, 4 method books, 18 journals, 1 Legislation, 2 Ministerial Regulation, and 1 Regent Regulation.

Kepenuhan Hulu Village shows an interesting phenomenon in village financial management, where the village government has encouraged the community to participate in the deliberation forum held as a forum for delivering accountability information and receiving feedback from the community as the main stakeholder. This phenomenon is certainly an indication of the practice of social accountability in village financial management in Kepenuhan Hulu Village. The formulation of this research problem is how social accountability in village financial management in Kepenuhan Hulu Village. This research aims to interpret the existence of the community in village financial management through the concept of social accountability.

This research uses the theory of social accountability by Grandvoinnet et. al, namely: Citizen Action, State Action, Civic Mobilization, Information, and Citizen-State Interface. This research method is qualitative with a descriptive approach. The collection technique is through observation, interviews, and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling technique. Data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity techniques using source triangulation.

The The results showed that the accountability of the Kepenuhan Hulu Village Government has reflected an effective social accountability mechanism through interaction between the government and the community. Accountability is not just a formal mechanism but manifests in the active involvement of the community through village deliberation forums and natural social interactions, which are strengthened by the government's commitment to information transparency although it is not yet supported by village digitalisation. The government's flexibility in responding to community demands through additional deliberation shows recognition of the community's capacity as the main stakeholder. This interaction has transformed the deliberation mechanism from a mere formality to an effective means of supervision, which ultimately confirms the position of the community not as symbolic participants but the main stakeholders in village financial management, thus creating a transparent and participatory village financial governance system.

Keywords: Accountability, Social Accountability, Community Existence, Village Financial Management, Public Participation.